

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertanian)
 - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
 - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
 - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
 - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
 - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

Perkembangan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah 2014

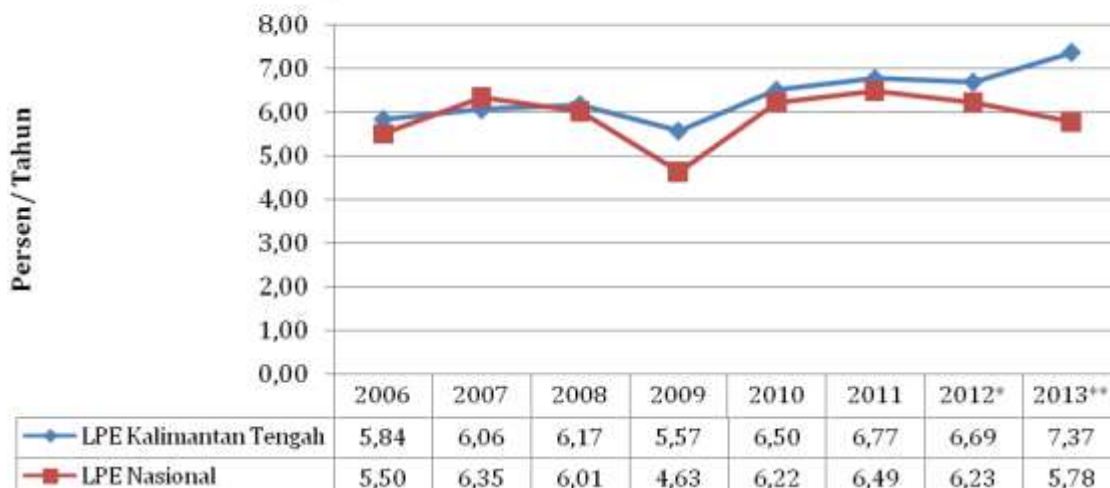
SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Perkembangan Indikator Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional terutama sektor perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki komoditas utama yaitu kelapa Sawit dan karet. Selama periode 2006-2013 kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah relatif cukup baik. Perekonomian daerah bertumbuh pada laju rata-rata 6,37 persen per tahun, di atas laju pertumbuhan rata-rata nasional sebesar 5,90 persen per tahun (Gambar 1). Dari perspektif wilayah, kontribusi PDRB Kalimantan Tengah terhadap output wilayah Kalimantan pada tahun 2013 sebesar 8,83 persen. Secara nasional, Kalimantan Tengah menyumbang sebesar 0,83 persen terhadap pembentukan PDB nasional.

Gambar 1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000

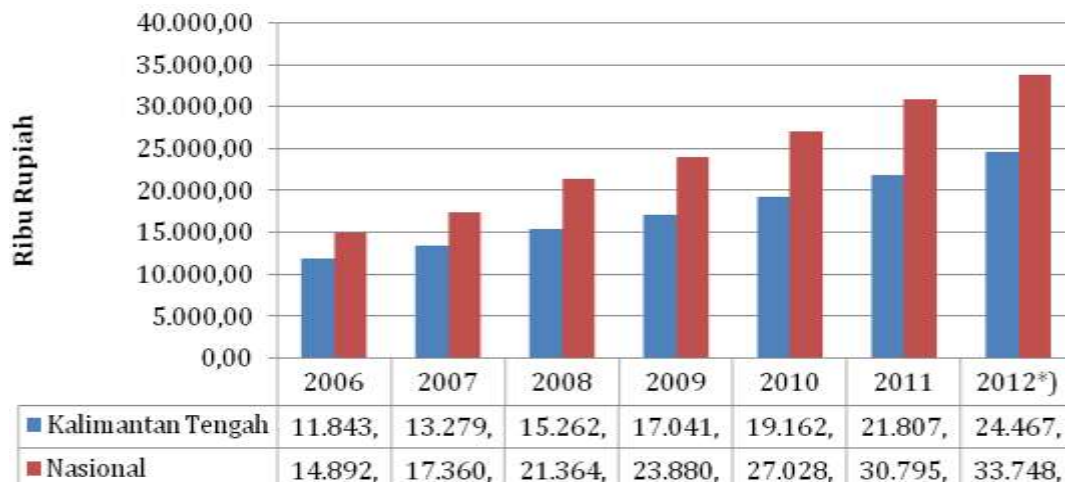


Sumber: BPS, 2013

Walaupun memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang berada di atas laju pertumbuhan nasional, namun Provinsi Kalimantan Tengah belum mampu menutup kesenjangan pendapatan perkapita dari rata-rata pendapatan perkapita nasional. Rasio PDRB per kapita antara Kalimantan Tengah dan nasional menurun dari 79,53 persen

menjadi 72,49 persen selama periode selama 2006-2012. Di tingkat wilayah Kalimantan, PDRB perkapita Kalimantan Tengah berada pada posisi kedua setelah Kalimantan Timur. Apabila pertumbuhan penduduk antar provinsi tidak terlalu berbeda jauh, ini menunjukkan kinerja rata-rata provinsi lain berkembang lebih pesat dari Kalimantan Tengah. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Gambar 2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

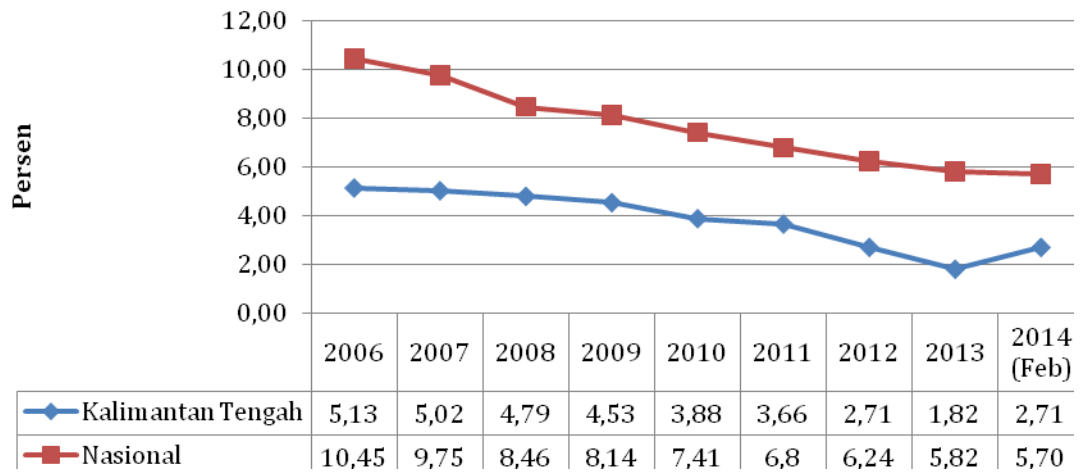


Sumber: BPS, 2013

2. Pengurangan Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi yang positif berhasil menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Tengah. Selama periode 2006-2013 tingkat pengangguran Kalimantan Tengah berkurang sebesar 7,00 persen (Gambar 3). Meskipun pada tahun 2006 terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), namun kondisi tersebut tidak berpengaruh terhadap peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Sektor ekonomi di Kalimantan Tengah cukup stabil dalam menghadapi gejolak harga BBM. Perbandingan secara nasional menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kalimantan Tengah tergolong rendah. Dengan PDRB per kapitayang cukup tinggi, maka tantangan yang harus diatasi adalah peningkatan produktivitas sektor perkebunan, kehutanan dan perikanan yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi.

Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka

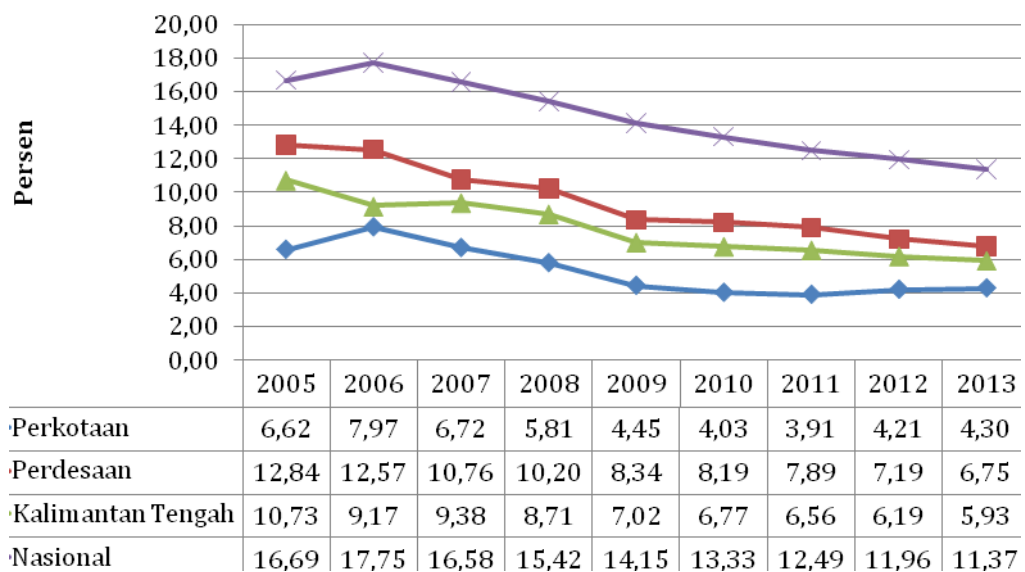


Sumber: BPS, 2014

3. Pengurangan Kemiskinan

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran, tingkat kemiskinan daerah juga berhasil ditekan. Selama periode 2006-2013, persentase penduduk miskin menurun dari 10,73 persen menjadi 5,93 persen (Gambar 4). Meskipun tingkat kemiskinan dapat diturunkan secara bertahap, namun demikian untuk kemiskinan di perdesaan perlu ditekan secara signifikan dikarenakan penurunannya yang relatif lebih lambat apabila dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini mengindikasikan terjadinya stagnasi pertumbuhan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya di perdesaan.

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2014

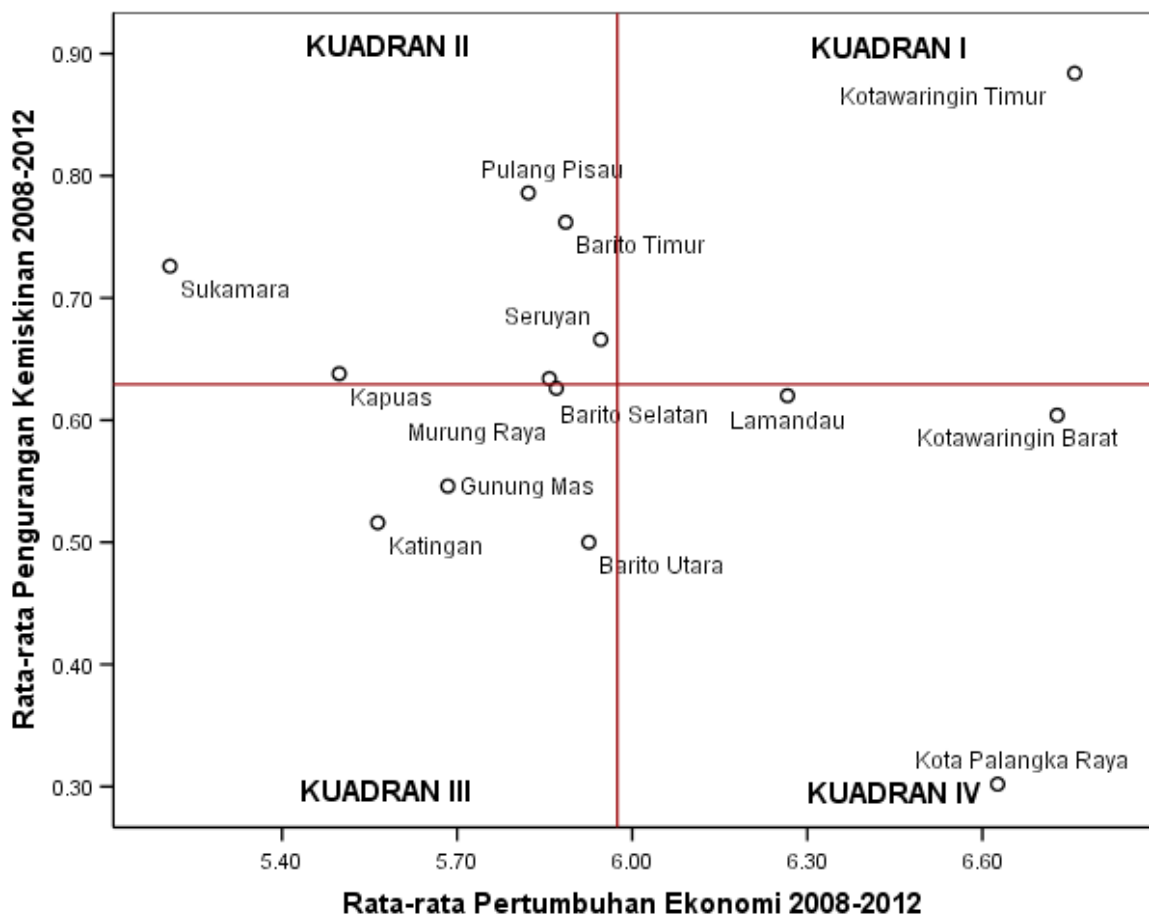
B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama* Kota Waringin Timur termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kedua, Kabupaten Pulau Pisang, Barito Timur, Seruyan, Kapyuas, Murung Raya, dan Sukamara terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

Ketiga, Kabupaten Barito Selatan, Gunung Mas, Kaltingan, dan Barito Utara terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Keempat, Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat dan Kota Palangkaraya terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

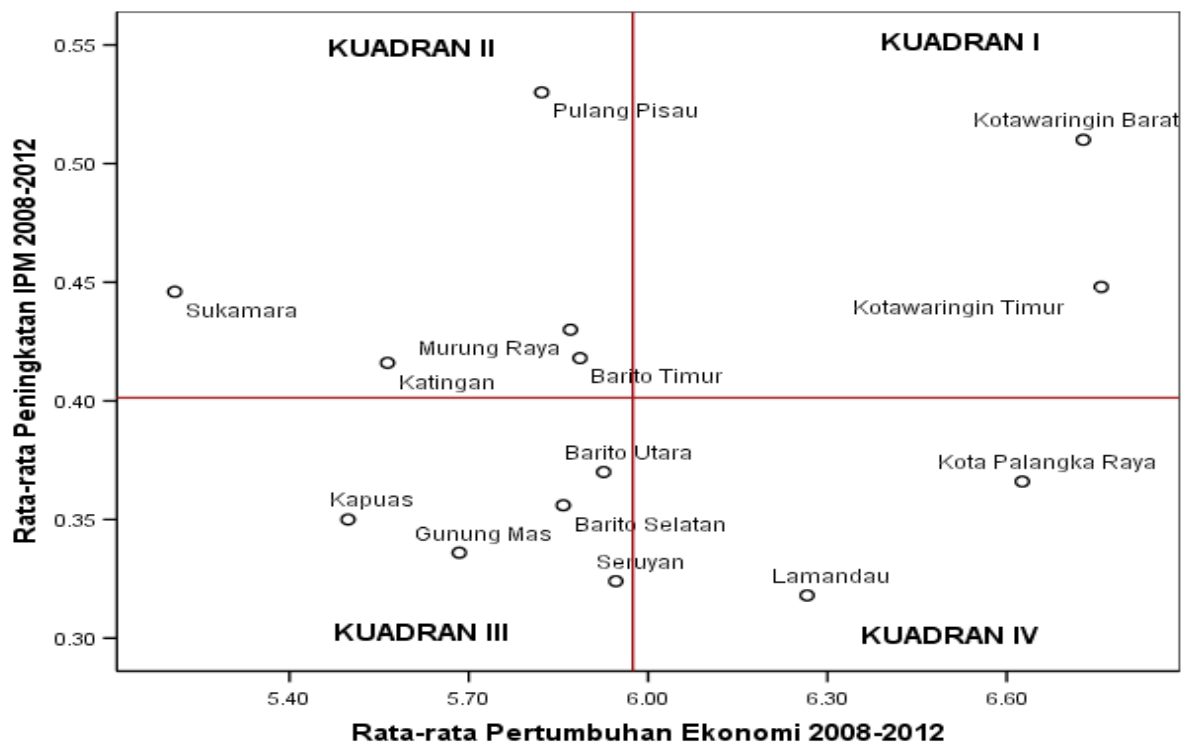
2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Pulang Pisau Sukamara, Murung Raya, Kaltingan, dan Barito Timur yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi

melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Ketiga, Kabupaten Barito Utara, Kapuas, Gunung Mas, Barito Selatan, dan Seruyan terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

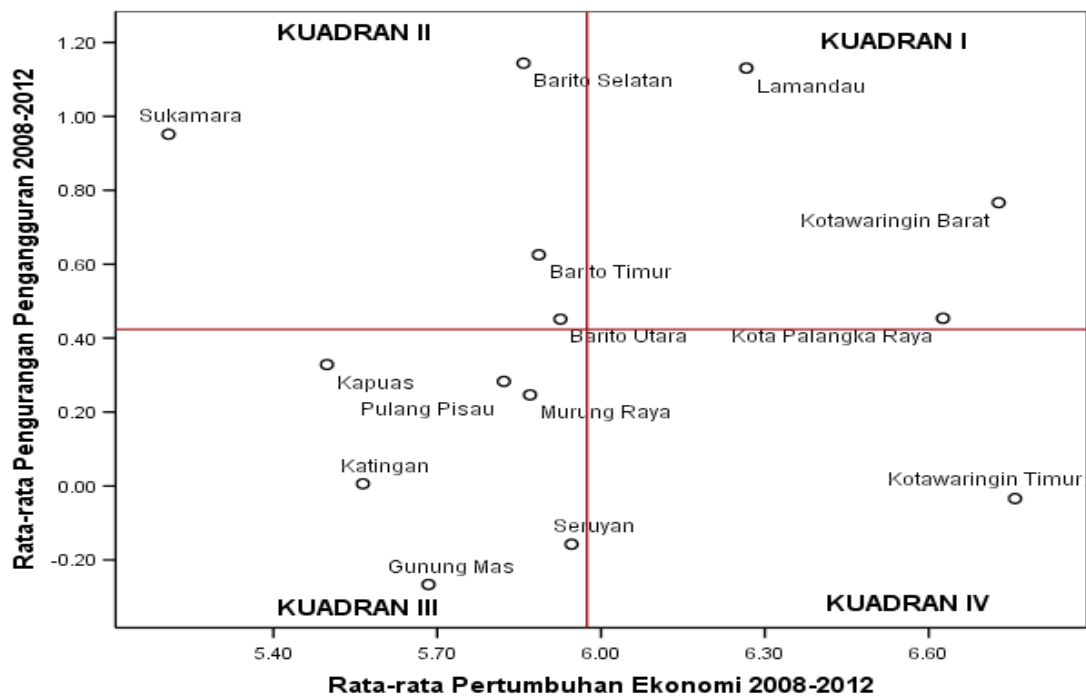
Keempat, Kabupaten Lamandau dan Kota Palangkaraya terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Lamandau, Kotawaringin Barat, dan Kota

Palangkaraya termasuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kedua, Kabupaten Sukamara, Barito Utara, Barito Timur, dan Barito Selatan yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

Ketiga, Kabupaten Kapuas, Pulau Pisang, Murung Raya, Katingan, Seruyan, dan Gunung Mas terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

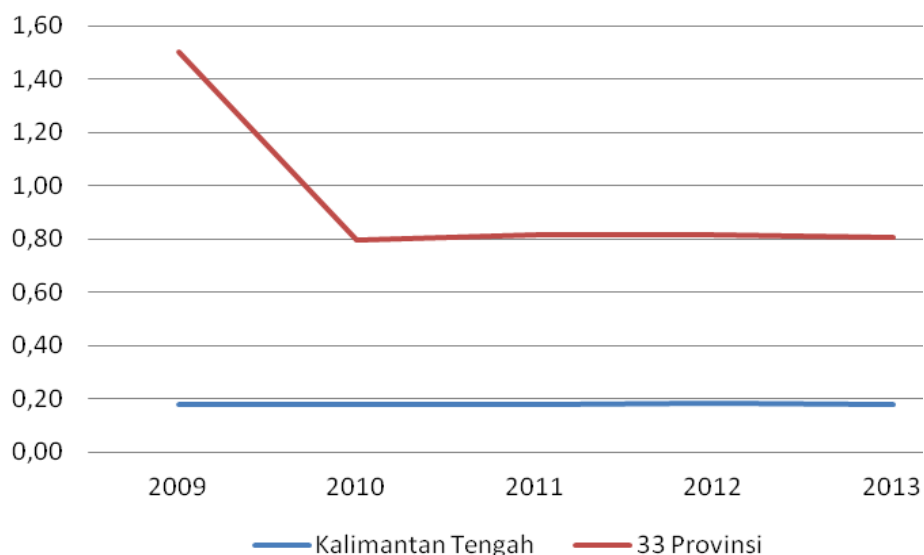
Keempat, Kabupaten Kotawaringin Timur terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata

(*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 tergolong kesenjangan rendah. Kesenjangan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di bawah nasional dengan kecenderungan semakin meningkat. Kesenjangan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah dikarenakan masih terbatasnya jangkauan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Kondisi di atas menghadapkan Kalimantan Tengah pada tantangan untuk meningkatkan, pemeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah

Gambar 8
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson)
Provinsi Kalimantan Tengah 2009-2013



Sumber: Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Kalimantan Tengah terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah. Besarnya pendapatan perkapita kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah memiliki besaran yang hampir sama karena kesamaan struktur perekonomian di wilayah ini, yaitu pada sektor pertanian.

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2007-2012 (000/jiwa)

Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kotawaringin Barat	15.034	16.390	17.678	19.026	21.394	23.850
Kotawaringin Timur	14.535	16.545	18.636	21.154	24.310	27.287
Kapuas	10.002	11.693	13.126	14.902	16.675	18.631
Barito Selatan	12.405	14.221	15.788	17.760	19.946	22.512
Barito Utara	14.051	15.545	17.263	19.299	21.827	24.080
Sukamara	19.987	20.640	21.285	23.466	25.846	28.092
Lamandau	13.525	14.460	15.248	17.061	19.175	21.277
Seruyan	14.179	14.969	15.749	17.569	19.741	21.117
Katingan	13.484	15.178	16.430	18.156	20.388	22.966
Pulang Pisau	7.762	8.639	9.538	10.785	12.003	13.695
Gunung Mas	10.068	11.015	11.667	13.121	14.796	16.249
Barito Timur	11.350	12.418	13.551	15.015	16.914	18.313
Murung Raya	15.863	17.147	19.230	21.597	24.936	28.031
Kota Palangka Raya	11.600	13.344	14.423	16.268	18.462	20.620
KALIMANTAN TENGAH	13.279	15.307	17.066	19.163	21.807	24.468

Sumber: BPS, 2013

C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Ketergantungan pada sektor pertanian

Peran sektor pertanian sebagai pendorong utama pertumbuhan daerah terus meningkat. Sektor pertanian memegang peran terbesar dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dengan pangsa sekitar 27 persen (Tabel 2). Selain pertanian, sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan paling pesat adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pada tahun 2013 perekonomian di Kalimantan Tengah didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan jasa-jasa. Sektor industri pengolahan di Kalimantan Tengah hanya memberikan kontribusi sebesar 6,65 persen, sementara sektor-sektor utilitas yang mendukung industrialisasi hanya berkontribusi di bawah 1 persen

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	27,11	27,99
2.	Pertambangan	9,96	11,55
3.	Industri Pengolahan	6,65	6,88
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,70	0,46
5.	Konstruksi	5,39	5,74
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	21,49	18,86
7.	Angkutan, Telekomunikasi	8,80	8,17
8.	Keuangan	6,22	7,01
9.	Jasa-jasa	13,69	13,34
		100,00	100,00

Sumber: BPS, 2013

Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah juga dilihat dari perkembangan sektor yang menghasilkan barang yang dapat diperdagangkan (*tradeable sector*). Sektor utama (basis) Provinsi Kalimantan Tengah adalah sektor pertanian (Tabel 3).

Tabel 3
Nilai LQ Sektor Perekonomian Kalimantan Tengah 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	2,39	2,36	2,35	2,34	2,33
a. Tanaman Bahan Makanan	0,79	0,78	0,76	0,70	0,74
b. Tanaman Perkebunan	7,10	7,18	7,52	7,52	7,24
c. Peternakan	2,13	2,11	2,00	2,02	2,07
d. Kehutanan	3,30	2,76	2,49	2,41	2,32
e. Perikanan	2,65	2,72	2,49	2,49	2,43
2. Pertambangan dan Penggalian	1,05	1,11	1,20	1,37	1,46
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Pertambangan Bukan Migas	2,96	2,95	3,07	3,46	3,52
c. Penggalian	0,56	0,59	0,61	0,62	0,60
3. Industri Pengolahan	0,30	0,30	0,31	0,29	0,28
a. Industri Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,33	0,33	0,33	0,31	0,30
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,63	0,57	0,57	0,59	0,60
a. Listrik	0,60	0,58	0,57	0,57	0,58
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	1,80	1,72	1,73	1,82	1,91
5. Konstruksi	0,86	0,87	0,86	0,89	0,89
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	1,02	1,08	1,07	1,05	1,05
a. Perdagangan Besar dan Eceran	1,13	1,21	1,18	1,14	1,14
b. Hotel	0,39	0,37	0,39	0,41	0,41
c. Restoran	0,55	0,53	0,56	0,61	0,64
7. Pengangkutan dan Komunikasi	1,08	0,93	0,87	0,80	0,78
a. Pengangkutan	2,24	2,10	2,06	1,95	1,93
1). Angkutan Rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2). Angkutan Jalan Raya	2,05	2,03	2,18	2,30	2,38
3). Angkutan Laut	1,38	1,62	1,67	1,72	1,72
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	25,55	21,54	19,10	15,17	13,68
5). Angkutan Udara	0,57	0,58	0,50	0,50	0,49
6). Jasa Penunjang Angkutan	0,84	0,83	0,87	0,87	0,88
b. Komunikasi	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	0,54	0,57	0,63	0,67	0,70

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
a. Bank	0,32	0,38	0,52	0,54	0,59
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	1,32	1,37	1,41	1,56	1,63
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,54	0,52	0,57	0,60	0,57
d. Real Estat	0,87	0,88	0,90	0,94	0,96
e. Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
9. Jasa-jasa	1,40	1,37	1,35	1,38	1,40
a. Pemerintahan Umum	2,79	2,75	2,75	2,83	2,95
b. Swasta	0,33	0,31	0,32	0,33	0,33
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,63	0,62	0,64	0,67	0,69
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	0,18	0,18	0,18	0,19	0,18
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,23	0,21	0,22	0,22	0,22

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Nilai *location quotient* subsektor perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa *share* subsektor tersebut untuk Provinsi Kalimantan Tengah secara proporsional lebih tinggi dari nasional. Dengan kata lain, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki keunggulan komparatif pada sektor-sektor tersebut dibanding daerah-daerah lain. Kecenderungan menarik adalah semakin menguatnya nilai LQ pada industri barang kayu dan hasil hutan lainnya yang mengindikasikan peluang dan potensi Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengembangkan industri tersebut. Oleh sebab itu, Provinsi Kalimantan Tengah perlu menumbuhkan subsektor-subsektor industri pengolahan lain khususnya yang memiliki kaitan kuat dengan barang kayu dan hasil hutan.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan memiliki arti yang sangat strategis bagi perekonomian daerah dalam dua hal. Pertama, permintaan terhadap produk manufaktur relatif lebih elastis terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dibanding permintaan terhadap komoditas pertanian primer. Kecenderungan meningkatnya pendapatan masyarakat dan bertambahnya proporsi kelas menengah diperkirakan akan disertai dengan meningkatnya permintaan barang-barang konsumsi yang dihasilkan dari sektor industri. Kedua, sektor industri pengolahan memiliki kelebihan dibanding sektor-sektor lain dalam penciptaan nilai tambah, dan dampak berganda bagi pengembangan sektor-sektor lain melalui kaitan ke depan (sektor pengguna) dan ke belakang (sektor penyedia input), serta penciptaan lapangan kerja.

Selama periode 2010-2014 sektor perdagangan dan jasa-jasa mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan meskipun memberikan kontribusi kecil pada perekonomian (Tabel 4). Ke depan, sektor industri pengolahan masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor bangunan yang kurang produktif.

Tabel 4
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	634.174	626.328	-7.846
2	Pertambangan	55.389	70.850	15.461
3	Industri Pengolahan	25.303	36.150	10.847
4	Listrik, Gas, Air	1.453	2.627	1.174
5	Bangunan	32.007	60.197	28.190
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	135.593	172.969	37.376
7	Angkutan & Telekomunikasi	37.565	25.353	-12.212
8	Keuangan	9.089	22.084	12.995
9	Jasa-Jasa	127.708	197.427	69.719
Total		1.058.281	1.213.985	155.704

Sumber: BPS, 2014

2. Kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi selama 2006-2013 adalah ekspor dan impor (Tabel 5). Pada tahun 2009, ekspor mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) cukup tajam karena adanya krisis ekonomi dunia yang diiringi pelemahan permintaan komoditas ekspor dari negara-negara maju. Pada tahun-tahun sebelumnya peranan ekspor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sangat tinggi dan dominan.

Tabel 5
PDRB Menurut Penggunaan 2013

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	43,25	27,90
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	1,29	35,40
3.	Konsumsi Pemerintah	18,19	12,87
4.	PMTB	46,75	29,51
5.	Perubahan Stok	3,27	0,01
6.	Ekspor	45,85	35,40
7.	Impor	58,60	41,08
Total		100,00	100,00

Sumber : BPS, 2013

Pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada ekspor sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dunia. Kontraksi sektor-sektor yang berorientasi ekspor berpotensi diikuti pengurangan tenaga kerja yang dapat berakibat pada meningkatnya pengangguran di daerah. Sementara itu, pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada konsumsi masyarakat memiliki batas dan tidak berkelanjutan. Dalam jangka menengah kondisi ini akan mengurangi potensi tabungan masyarakat. Padahal tabungan sangat penting bagi perekonomian karena dapat menjadi sumber investasi sektor produktif melalui intermediasi perbankan. Oleh karena itu, tantangan yang harus diatasi adalah mendorong

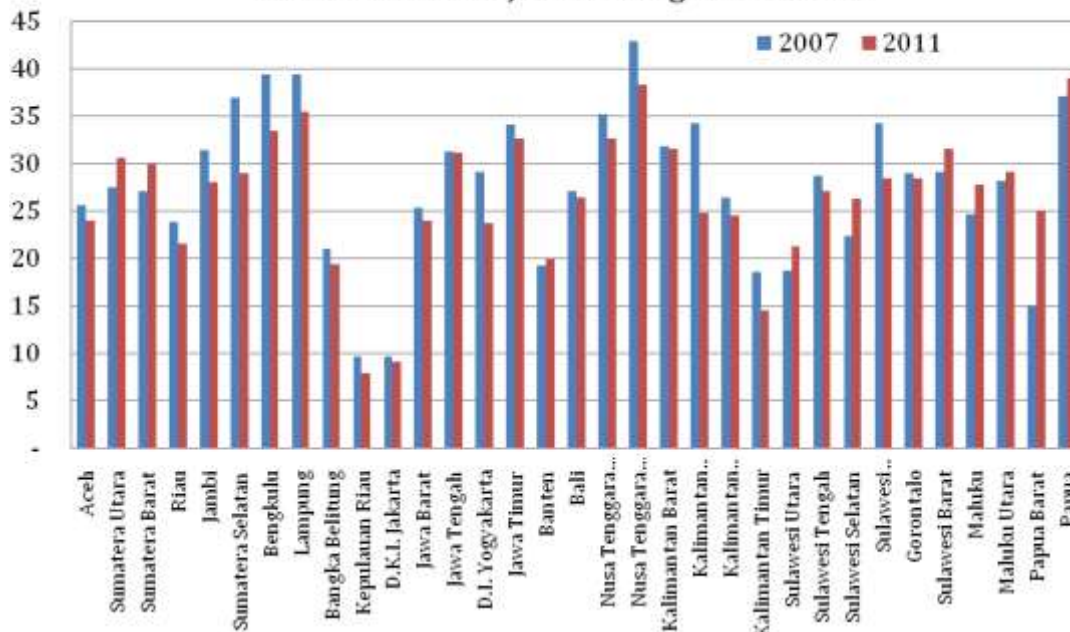
terciptanya keseimbangan sumber-sumber pertumbuhankhususnya dengan meningkatkan peran investasi (pembentukan modal tetap bruto) dalam perekonomian daerah.

Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu ditingkatkan adalah iklim usaha di daerah. Iklim usaha yang kondusif bagi investasi terbentuk dari kualitas regulasi yang konsisten, perpajakan yang transparan dan tidak tumpang tindih, pelayanan perijinan yang efisien, dan kelembagaan penyelesaian konflik yang efektif. Langkah penting dalam perbaikan pelayanan perijinan adalah pelaksanaan dan penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara sungguh-sungguh dan konsisten. Dalam hal ini, semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat secara formal telah memiliki badan/kantor yang menyelenggarakan PTSP. Ukuran keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut adalah peningkatan efisiensi perijinan yang harus tercermin dari menurunnya biaya dan waktu yang diperlukan oleh para pelaku usaha.

3. Rendahnya Kualitas lapangan Kerja

Salah satu penyebab dari rendahnya PDRB/kapita dan masih tingginya kemiskinan daerah adalah rendahnya kualitas lapangan kerja yang tersedia. Kondisi ini dapat diamati dair tingginya persentase pekerja dengan status pekerjaan kurang berkualitas, yakni pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian, dan pekerja tak dibayar. Para pekerja di kelompok ini sangat rentan untuk terjerumus dalam lingkaran kemiskinan karena sifat pekerjaan yang tidak pasti dan umumnya mendapatkan upah yang sangat rendah.

Gambar 9
Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas



Sumber: BPS, 2012

Tingkat pengangguran terbuka yang rendah di Kalimantan Tengah adalah karena masyarakat bersedia bekerja apa saja untuk mempertahankan hidup. Pada tahun 2011, persentase pekerjaan kurang berkualitas di Kalimantan Tengah menurun signifikan dari setahun sebelumnya, tetapi angkanya masih cukup tinggi di wilayah Kalimantan (Gambar 9). Penurunan tingkat pengangguran juga melambat sejak tahun 2008 terkait dengan melemahnya permintaan atas komoditas ekspor akibat krisis ekonomi dunia. Melemahnya permintaan di pasar dunia di samping menurunkan volume ekspor juga biasanya diikuti oleh turunnya harga komoditas.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah belum berhasil mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Oleh sebab itu, pemerintah daerah tidak boleh berpuas diri dengan indikator pengangguran yang rendah. Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah perlunya mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian yang dapat menciptakan lapangan kerja alternatif dan lebih berkualitas serta memberikan nilai tambah dan pendapatan yang lebih besar.

4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Optimalisasi posisi Kalimantan Tengah yang dapat mendukung pengembangan wilayah Kalimantan mutlak membutuhkan dukungan prasarana perhubungan yang baik khususnya memperlancar lalu lintas penduduk dan distribusi barang. Salah satu prasarana utama adalah jalan. Kalimantan Tengah dilayani oleh jaringan jalan sepanjang 13.765 km. Ketersediaan jaringan jalan di Kalimantan Tengah masih sangat rendah apabila diukur dari kerapatan jalan (panjang jalan per kilometer persegi) karena berada di bawah kerapatan jalan nasional (Tabel 6).

Tabel 6
Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
13	Sumatera Utara	26.185	49,50
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71

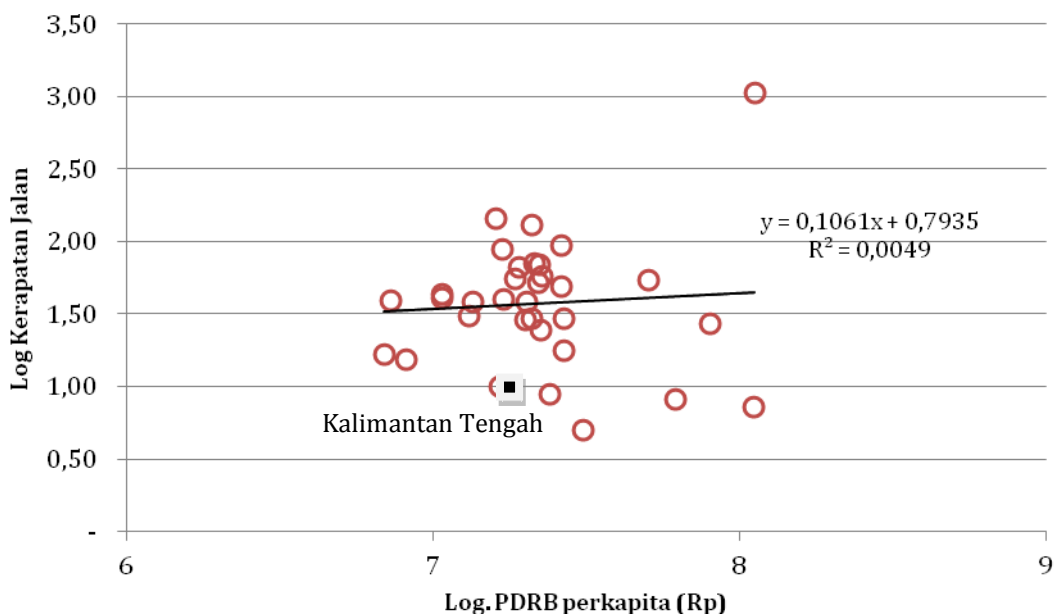
No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
Indonesia		33.531	25,99

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Dengan memperhatikan pola hubungan antara pendapatan per kapita dan kerapatan jalan wilayah untuk 33 provinsi, posisi Kalimantan Tengah menunjukkan adanya hubungan yang positif antara PDB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 10). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita semakin tinggi diikuti dengan semakin tingginya kerapatan jalan. Wilayah yang posisinya terletak di bawah kurva linier berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan kata lain, panjang jalan kurang dari yang seharusnya dimiliki suatu wilayah sesuai dengan tingkat pendapatannya. Posisi Kalimantan Tengah dalam diagram ini berada dibawah kurva. Hal ini berarti bahwa secara kuantitas kerapatan jalan di Kalimantan Tengah di bawah rata-rata nasional.

Gambar 10

Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Secara kualitas, kondisi jalan di Kalimantan Tengah relatif baik, ditunjukkan dari panjang jalan yang sudah beraspal di provinsi ini. Permukaan jalan beraspal di Sulawesi Utara sudah mencapai 81 persen (Tabel 7), menunjukkan daya dukung jalan untuk pergerakan barang relatif baik

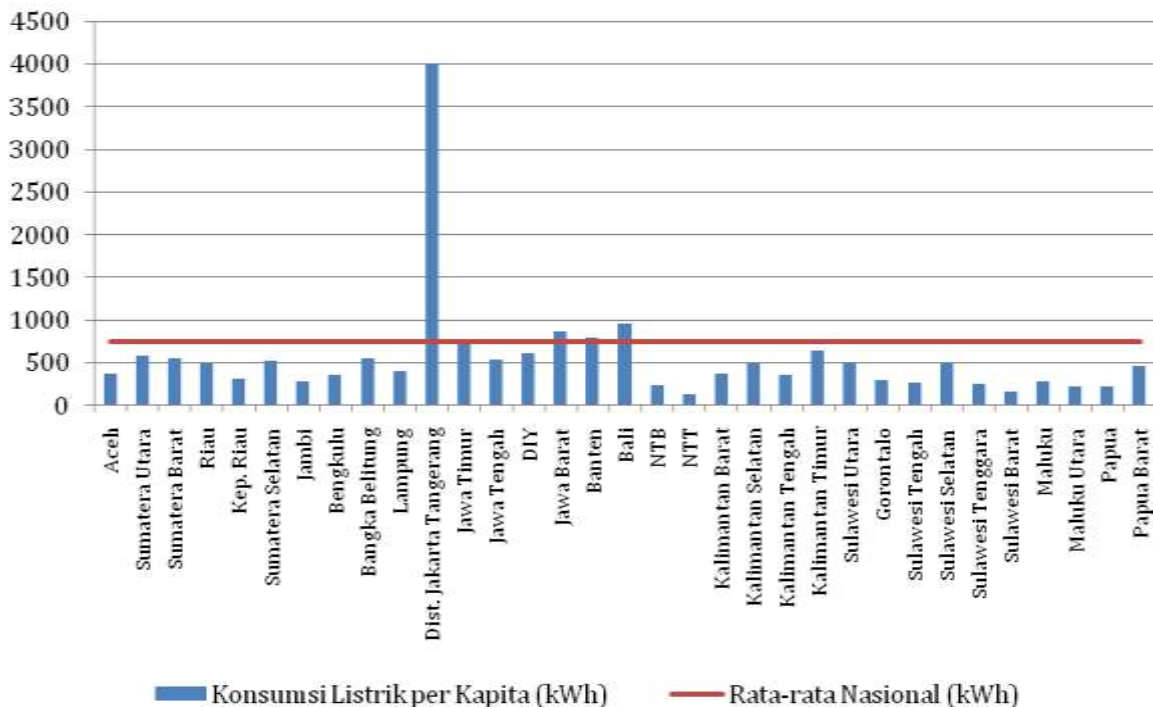
Tabel 7
Panjang Jalan Nasional Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012

PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN									
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya		Total	
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Kalimantan Tengah	1.389	81	184	11	128	8	7	0	1.708	100
Kalimantan	4.660	81	615	11	429	8	23		5.727	100
INDONESIA	42.284	79	5018	9	3504	7	2836	5	53.642	100

Sumber: BPS, 2012

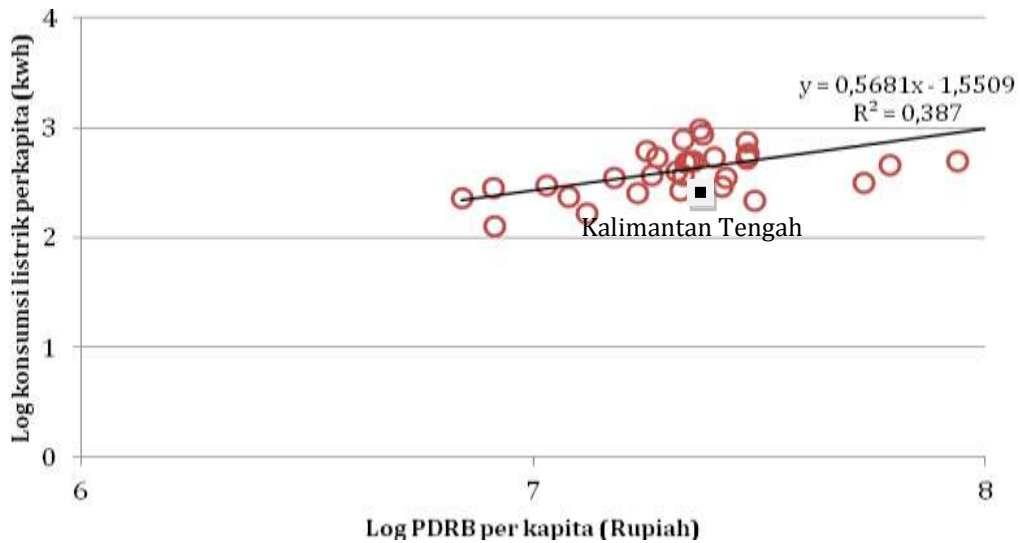
Infrastruktur lain yang juga sangat penting bagi perekonomian wilayah adalah kelistrikan. Dengan membandingkan kondisi di 33 provinsi, konsumsi listrik perkapita di Kalimantan Tengah berada di bawah rata-rata nasional dan merupakan yang terendah di wilayah Kalimantan (Gambar 11). Untuk mengukur defisiensi terhadap infrastruktur kelistrikan digunakan cara yang sama, yaitu dengan melihat korelasi antara pendapatan perkapita dan konsumsi listrik perkapita terlihat hubungan yang positif antara PDB per kapita dengan tingkat konsumsi listrik (Gambar 12). Wilayah yang memiliki posisi di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik.

Gambar 11
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: Statistik PLN, 2013

Gambar 12
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013

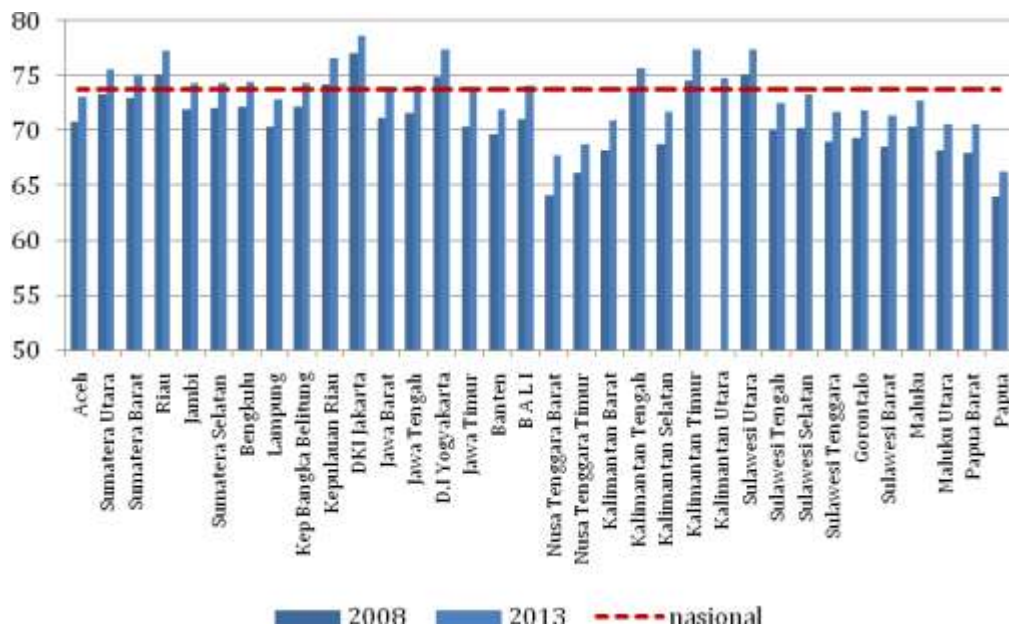


Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan.

Gambar 13
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

Kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Tengah yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008 dan berada di atas IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 13). IPM Kalimantan Tengah berada pada peringkat 7 secara nasional pada tahun 2013 dengan nilai IPM sebesar 75,68. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari 71 tahun pada tahun 2008 menjadi 71,47 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Kalimantan Tengah meningkat dari 8 tahun pada 2008 menjadi 8,17 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Kalimantan Tengah pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 97,67 menjadi 97,99 persen, lebih tinggi dari capaian nasional 94,14 persen.

Meskipun IPM sudah mencapai angka yang cukup baik, namun perkembangan sumber daya manusia di Kalimantan Tengah juga dapat dilihat dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA (SMU, SMK, Diploma, Universitas) meningkat dari tahun 2008 ke tahun 2014 (Tabel 8), namun angka ini terendah di Wilayah Kalimantan. Perbaikan struktur angkatan kerja ini perlu terus didorong untuk mendukung transformasi ekonomi daerah berbasis agroindustri.

Tabel 8
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan	2008	2014	Perubahan
1	≤ SD	589.534	584.045	(5.489)
2	SMTp	199.930	255.701	55.771
3	SMTA Umum	179.918	280.453	100.535
5	Diploma I/II/III/Akademi	28.012	35.627	7.615
6	Universitas	32.051	91.944	59.893
Total		1.029.445	1.247.770	218.325

Sumber: BPS, 2014

6. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Tabungan masyarakat yang dihimpun bank umum dan BPR di Provinsi Kalimantan Tengah ternyata lebih rendah dibanding pinjaman yang dikucurkan. Kondisi ini mengindikasikan terbatasnya dana perbankan di daerah yang bisa dikonversi menjadi investasi bagi kegiatan produktif. Rasio pinjaman dan simpanan masyarakat Kalimantan Tengah di Bank Umum dan BPR tahun 2013 sebesar 1,92 (Tabel 9)

Tabel 9
Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013

Wilayah	Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp)	Rasio Pinjaman terhadap Simpanan	Rasio PMTB terhadap Simpanan
Kalimantan Tengah	16.024	30.833	1,92	1,85
Kalimantan	173,718	217.741	1,25	0,80
Nasional	3.575.891	3.322.683	0,92	0,47

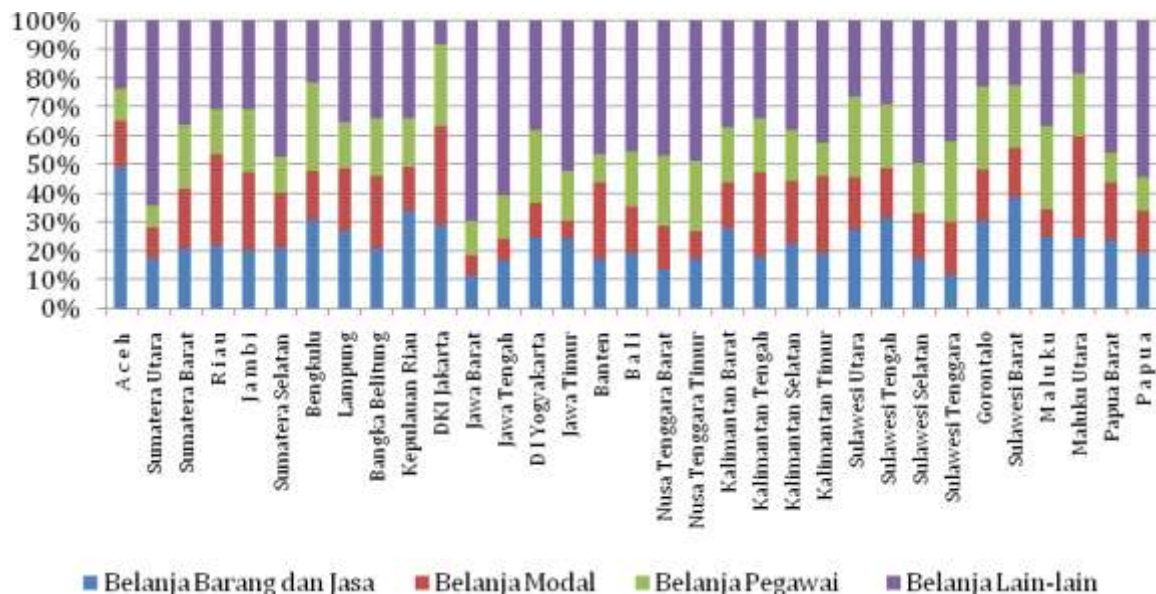
Sumber: BPS, 2013

Hal ini berarti bahwa kegiatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah ditentukan oleh suntikan dana dari luar. Dengan kata lain, pembangunan di Kalimantan Tengah dibiayai oleh tabungan masyarakat luar daerah. Dalam jangka panjang terbatasnya sumber dana pinjaman ini akan berisiko meningkatkan harga modal (*cost of fund*) di daerah. Dengan kondisi tingginya permintaan kredit, bank-bank umum mungkin menerapkan tingkat bunga kredit yang sama antardaerah, namun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya tentu akan meningkatkan imbal hasil (bunga) pinjaman. Kenaikan bunga pinjaman akan memberatkan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Tantangan yang harus diatasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah mengembangkan kerjasama dengan perbankan dalam penjaminan kredit dan mobilisasi tabungan masyarakat.

7. Rendahnya Kualitas Belanja Daerah

Berdasarkan data total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2013, porsi belanja modal dalam total belanja APBD di Kalimantan Tengah sebesar 29,24 persen. Sementara itu porsi belanja pegawai, meliputi belanja pegawai dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar 18,82 persen (Gambar 14).

Gambar 14
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



Sumber: BPS, 2013

Ke depan perlu didorong perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini yang lebih mengarah pada belanja modal. Belanja modal memiliki dampak langsung yang relatif besar kepada perekonomian. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, namun perannya tidak tergantikan dalam suatu perekonomian. Pembangunan prasarana publik seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan listrik mutlak memerlukan peran pemerintah. Peran investasi pemerintah ini dirasa

semakin penting di daerah-daerah yang level investasi swastanya relatif rendah. Investasi pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Daerah dengan tingkat pendapatan perkapita relatif rendah pada umumnya akan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena investasi akan memberikan tambahan output (*marginal product of capital*) yang lebih tinggi. Demikian juga halnya dengan Provinsi Kalimantan Tengah, prospek pertumbuhan daerah di tahun 2013 akan ditentukan oleh seberapa besar realisasi investasi di daerah. Dalam konteks ini Provinsi Kalimantan Tengah memiliki modal berharga.

Struktur angkatan kerja mengalami pergeseran yang kondusif bagi industrialisasi. Secara relatif angkatan kerja masih didominasi lulusan setingkat SMP ke bawah, namun secara konsisten porsi lulusan SMA ke atas meningkat. Hal ini penting mengingat salah satu faktor yang mendorong pengembangan industri adalah tersedianya *pool* angkatan kerja dengan ketrampilan dan spesialisasi yang cukup dalam jumlah yang banyak.

Berdasarkan kinerja pembangunan selama ini dan modal pembangunan yang dimiliki, prospek pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target utama RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 6,1 – 8,7 persen dapat tercapai. Di Kawasan Timur Indonesia kinerja ekonomi akan semakin membaik berkat meningkatnya produksi pertanian dan aktivitas pertambangan setelah diberlakukannya ijin ekspor mineral bagi para penambang besar. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah telah meningkat pada akhir 2014 melebihi perkiraan sebelumnya. Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam melimpah yang berpotensi untuk terus meningkatkan PDRB di wilayah ini.
2. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 6,0 – 4,3 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 5,93 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Kalimantan Tengah harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 1,63 poin persentase atau 0,27 poin persentase per tahun.
3. Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Kalimantan Tengah maupun lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa mengganggu kinerja perekonomian daerah.

E. Penutup

1. Isu Strategis Daerah

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas sektor pertanian
- b. Industrialisasi dan pengembangan lapangan kerja berkualitas
- c. Peningkatan investasi di daerah
- d. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan
- e. Pemerataan kualitas sumber daya manusia
- f. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha
- g. Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah

2. Rekomendasi Kebijakan

Penanganan isu-isu strategis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- b. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi *brand/citra* komoditas unggulan daerah;
- c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- d. Perbaikan kualitas jaringan jalan;
- e. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah;
- f. Pemerataan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan);
- g. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
- h. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.

